



Munich Personal RePEc Archive

# **THE CHURCH AND THE WELFARE OF CONGREGATION IN THE PERSPECTIVE OF COMMUNITY ECONOMY**

Nababan, Tongam Sihol

University of HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, The Church of  
HKBP District X Medan-Aceh

17 April 2011

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/49096/>

MPRA Paper No. 49096, posted 20 Aug 2013 00:55 UTC

# GEREJA DAN KESEJAHTERAAN WARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI KERAKYATAN<sup>\*)</sup>

Oleh : T. Sihol Nababan<sup>\*\*)</sup>

## I. PENDAHULUAN

Tuhan memberkati Indonesia dengan kekayaan sumber alam yang luar biasa. Meskipun demikian, di negara kita yang sudah memasuki usia ke-56, kita terus menyaksikan bahwa yang namanya “*kesejahteraan warga*” masih jauh dari yang diharapkan. Ada beberapa indikator sosial-ekonomi yang menjadi perhatian yaitu tingkat kemiskinan, indeks persepsi korupsi yang memprihatinkan, dan indeks pembangunan manusia yang belum membanggakan.

Data statistik Indonesia tahun 2009 menunjukkan bahwa 39.05 juta atau 17.5 % dari total penduduk Indonesia hidup dalam keadaan sangat miskin karena hanya mampu mempertahankan hidupnya dengan total biaya hidup sekitar Rp 5.128 / hari. Kalau kita menggunakan standar hidup Rp 15.000/hari/orang maka jumlah warga masyarakat miskin di Indonesia meningkat drastis menjadi 110 juta atau 49 % dari total penduduk Indonesia saat ini (Wilhelmus, 2010). Laporan UNDP bertajuk *Tackling Corruption* menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2009 sebesar 2,8 (skala 1 sampai 10, dimana 1 paling korup dan 10 paling bersih). Begitu juga dengan kualitas hidup manusia Indonesia yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia masih berada pada posisi 108 (*medium human development*) dari 169 negara di dunia (HDI UN, 2010 ; RPJM 2010 – 2014).

Banyak lagi persoalan-persoalan struktural lainnya yang belum teratasi terutama ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antar wilayah, tingginya tingkat pengangguran, dan persoalan struktural lainnya seperti budaya yang permisif atas pelanggaran hukum, korupsi, dan berbagai penyakit sosial lainnya. Menghadapi kenyataan ini, berbagai usaha telah dilakukan pihak pemerintah dan swasta untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Tetapi upaya itu belum menunjukkan hasil yang optimal karena terkendala oleh sejumlah faktor seperti penerapan mekanisme pasar yang tidak pro-rakyat, kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat kecil, globalisasi dan kesenjangan budaya.

Ditengah kehidupan yang tidak menguntungkan ini, pemerintah seharusnya menjaga dan memastikan bahwa kesejahteraan bersama tetap menjadi tujuan utama hidup berbangsa yang diperjuangkan melalui berbagai kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan perangkat utama pemerintah untuk mengejar tujuan dan kesejahteraan bersama. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa banyak pihak lebih suka memanfaatkan posisi jabatan serta kebijakan publik untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Tidak sedikit kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif terus mengingkari mandat yang diterimanya dari masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.

<sup>\*)</sup> Makalah ini disajikan pada Seminar Nasional Revitalisasi Peran Lembaga Agama terhadap Kesejahteraan Warga, Jubileum 150 tahun HKBP (1861 – 2011), Medan 7 April 2011.

<sup>\*\*)</sup> Tongam Sihol Nababan adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.



Mereka lebih mengutamakan perjuangan kenaikan gaji dan tunjangan hidup pribadi dari pada kepentingan dan kemajuan masyarakat yang diwakili.

Beberapa kenyataan lainnya adalah : (1) apabila setiap berurusan dengan aparat pemerintahan misalnya ketika mengurus KTP, IMB, paspor, pajak, tilang, dan lain sebagainya, kita selalu siap dengan salam tempel, (2) bila budaya dusta, tidak transparan, sogok, korupsi, kolusi, koncoisme sudah biasa kita lakukan dalam berbagai urusan, (3) bila para "parhalado" sendiri mengartikan perannya bukan sebagai panggilan atau pelayan tetapi sebagai karir atau profesi, (3) bila gereja sendiri pecah karena hal-hal seperti perebutan aset, primordialisme, penyelewengan dana, perebutan jabatan, ketidakjujuran ; tidak heran bila dunia ekonomi kita kini juga terpuruk dan dunia politik kita juga terancam hal yang sama.

Melihat realitas sosial-ekonomi ini, Gereja perlu memiliki kepekaan dan komitmen yang kuat untuk mendorong kerjasama antara elemen pemerintah, kekuatan pasar, institusi komunitas untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan terpinggirkan. Seharusnya Gereja terpenggil untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat dengan visi membangun jemaat swadaya. Jemaat swadaya adalah komunitas jemaat yang mampu berpikir, merencanakan dan mewujudkan mimpi, harapan dan cita-cita hidup kedepan dengan usaha dan kekuatan sendiri demi suatu kehidupan yang lebih layak dan lebih adil.

Seyogianya, kealpaan Gereja selama ini untuk menyikapi hal-hal di atas tidak bisa kita teruskan dalam keterlengaan. Inilah waktunya bagi Gereja (dan jemaatnya) untuk menyadari perlunya reformasi dalam mentalitas, sikap kerja, etika dan moral ekonomi, yang harus diisi dengan optimalisasi peran Gereja sebagai institusi dan pribadi Kristen. Gereja kita harus hidup dan kembali ke jati diri yang benar (*Khotbah Ephorus HKBP Pdt. Dr. Bonar Napitupulu pada 1 Januari 2011*) yaitu : *pengikut Kristus, menjangkau semua anggota jemaat, melayani secara holistik, memberi secara sukarela, menjadi motor dan penggerak Oikumene.*

## II. GEREJA DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI WARGA (JEMAAT)

Banyak orang mempertanyakan : (1) Haruskah gereja turut memikirkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh jemaatnya ? (2) Bukankah gereja sebenarnya hanya fokus pada masalah keimanan ?

Dalam konteks peranan Gereja dalam masyarakat, Fernandez (2005) menegaskan bahwa konsep Gereja sebagai Umat Allah selalu mendorong kita supaya lebih aktif mengintegrasikan diri kita dengan pengalaman hidup umat manusia dan lebih terbuka terhadap situasi politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan, keadilan sosial, kesejahteraan serta lingkungan hidup masyarakat (dalam Wilhelmus, 2010b). Dengan demikian saat masyarakat diselimuti oleh situasi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan maka Gereja perlu tampil membantu dan mendidik masyarakat supaya bisa mendefinisikan dirinya sendiri sebagai agen pembaharu yang mampu membebaskan diri dari situasi yang dihadapi dengan kekuatannya sendiri. Menemukan ulang kemerdekaan manusia adalah tugas Gereja, artinya Gereja dalam berbagai bidang kehidupan harus aktif membebaskan manusia dan membawanya ke dalam kehidupan yang sejahtera (Lumbantobing, 2007).



Salah satu unsur penyejahtera jemaat adalah usaha ekonomi jemaat. Namun konteks ekonomi jemaat jarang diangkat sebagai topik yang menarik untuk didiskusikan di tengah-tengah jemaat, justru lebih menarik membahas topik-topik lain, seperti budaya, hukum, politik, dan lain sebagainya. Padahal banyak nilai-nilai ekonomi yang dapat dipelajari dan dikembangkan dalam program pelayanan. Kadangkala membicarakan tingkat keuntungan, bunga uang, tender proyek, kekayaan dan hal-hal lain yang menyangkut ekonomi dan bisnis menjadi sesuatu yang tabu. Gereja tidak boleh berbisnis, tidak boleh mengejar keuntungan (laba). Mengapa demikian ? Selama ini, ada pemahaman yang salah mengenai prinsip ekonomi (bisnis) yang sudah melekat di benak masyarakat yaitu *"dengan pengorbanan (modal) sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya"* sehingga jika pemahaman ini diaplikasikan di lingkungan Gereja menjadi sesuatu yang salah, berlawanan dengan iman Kristiani, karena prinsip itu dapat mengizinkan (menghalalkan) segala cara untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Pemahaman prinsip ekonomi (bisnis) yang salah tersebut disinyalir disalahtafsirkan atau dipahami secara tidak lengkap dari model *"kebebasan bersaing"* (*freedom to compete*) yang dipopulerkan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations (1776)*<sup>(1)</sup> sebagai pemicu munculnya *"kapitalisme"*. Dalam ulasan Skousen (2001, 2005) tentang *The Wealth of Nations* ini, sesungguhnya masyarakat ideal yang dicita-citakan Adam Smith adalah masyarakat yang dipenuhi oleh nilai kebaikan, kedermawanan, dan hukum sipil yang melarang praktik ekonomi (bisnis) curang dan tidak adil. Smith ingin mengintegrasikan ekonomi dengan perilaku moral<sup>(2)</sup>. Lebih tegas lagi Smith menyatakan bahwa salah satu fungsi yang paling ekonomis dan signifikan dari kepercayaan agama adalah untuk memberikan insentif yang kuat untuk mempertahankan moral yang dapat membantu dan mendukung masyarakat madani, yaitu, kejujuran, kebajikan, menahan diri dari kekerasan dan kerakusan, dan sebagainya (Nath, 2007).

Alkitab sendiri banyak memberikan pendidikan dan prinsip-prinsip ekonomi bagi kita, misalnya seperti terdapat pada nats-nats : Amsal 3:9-10 ; Amsal 11 : 25 ; Matius 25 : 14-30 ; 2 Korintus 9:6-8 ; Filipi 4 :19. Bahkan Dalam Alkitab, ada lebih dari 2.350 ayat mengenai cara mengelola uang dan harta (Dayton, 2005).

---

<sup>(1)</sup> Dalam naskah asli *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations (1776)*, reprinted 1976 (p. 687) tertulis : **"Every man, as long as he does not violate the laws of justice, is left perfectly free to pursue his own interest in his own way, and to bring both his industry and capital into competition with those of any other man, or order of men"** (West, 1990). Artinya : "Setiap orang, sepanjang dia tidak melanggar hukum keadilan, diperbolehkan secara bebas mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, dan diperbolehkan bersaing dengan orang lain di bidang usaha dan pengumpulan modal".

<sup>(2)</sup> Tujuan Adam Smith menulis *The Wealth of Nations (1776)* adalah untuk mendobrak pandangan konvensional yang dianut oleh kaum merkantilisme, yang menguasai perdagangan dan kekuasaan politik pada masa itu. Ia ingin mengganti sistem itu dengan sistem yang menghasilkan kekayaan dan pertumbuhan nyata yang dapat membawa Inggris dan seluruh dunia menuju perbaikan terhadap nasib orang-orang awam.



Kebobrokan sosial - ekonomi yang sedang kita derita saat ini adalah akibat dari orang-orang yang berpola pikir dan bertingkah laku memberontak menolak Allah dalam percaturan bisnis dan kehidupan ekonomi. Apabila orang Kristen dan Gereja ingin berkontribusi nyata terhadap reformasi ekonomi supaya terarah dengan benar, maka haruslah kita mulai dari pemikiran Alkitabiah, seperti :

- (1) Menganggap kekayaan ekonomi bukanlah miliknya sendiri, tetapi milik Allah yang dititipkan.
- (2) Tidak menjadi egois menyimpan kekayaan ekonomi untuk diri sendiri, tetapi Tuhan menginginkan itu juga menjadi berkat untuk sesama.
- (3) Tidak menjadikan kekayaan ekonomi sebagai andalan hidup dan kekayaan tidak menghalangi hubungan dengan Tuhan.
- (4) Dalam upaya mengumpulkan kekayaan ekonomi tidak membuat seseorang menyimpang dari iman.

Sejatinya, Gereja harus mengaku jujur bahwa masalah-masalah ekonomi tidak lepas dari andil kegagalan Gereja, teolog dan umat Kristen dalam menaati kebenaran firman Tuhan. Gereja gagal memberikan pengajaran yang jelas dan benar tentang implikasi-implikasi kebenaran Alkitab ke dalam dunia ekonomi, tentang prinsip-prinsip etika ekonomi dan moral bisnis, baik kepada warganya maupun menyuarakannya sebagai wawasan dan sikap Kristen tentang ekonomi kepada dunia luas. Menurut Hidayat (2006) justru sebaliknya Gereja sendiri malah cenderung membuat kesalahan fatal memahami berita keselamatan dari Allah dalam simbol-simbol moneter. Banyak orang menganggap bahwa Gereja yang "maju" hanyalah gereja-gereja yang bersemangat dalam pelayanan dengan memanfaatkan teknik, metode dan alat-alat canggih yang sama seperti dikembangkan dalam teknik-teknik marketing. Kebanyakan teori tentang kemajuan dan pertumbuhan gereja menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan bukan perilaku pertobatan sampai ke segi-segi kehidupan ekonomi. Oleh karena itu sebagaimana disarankan oleh Mangeloja (2003), Gereja juga dapat berfokus pada institusi tertentu yang dapat mewujudkan dan meningkatkan kinerja ekonomi jemaatnya, bukan hanya pada keyakinan dan keimanan.

Wayan Mastra (dalam Veen, 2009) menekankan pentingnya mengembangkan perekonomian jemaat dengan konsep **"Teologi Perut"** yang menyatakan bahwa perut yang kosong tidak mempunyai telinga. Artinya, jika jemaat masih mengalami pergumulan dalam kebutuhan hidup sehari-hari, maka akan sulit bagi mereka menerima Firman Tuhan. Mastra berpendapat orang Kristen seharusnya tidak hidup dalam kemiskinan tapi hidup sebagai "kapitalis" dalam arti selalu melipatgandakan modal dan kemampuannya sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang pelipatgandaan talenta. Namun Mastra sendiri menanggapi bahwa kegiatan bisnis gereja adalah rohaniah. Karena semua pemikiran kegiatan bisnis Gereja adalah rohaniah maka semua pemikiran maupun kegiatan bisnis Gereja didasari oleh usaha penyerahan diri dan membangun hubungan baik dengan Allah. Hubungan yang baik dengan Allah itulah yang menyebabkan hidup seseorang dianugerahi berbagai bentuk berkat.

Dalam praktek, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh komunitas Gereja untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi jemaatnya. Tidak sedikit gereja di dunia mengoperasikan bisnis dan mereka menganggapnya bukan lagi sebagai kegiatan ekonomi



semata melainkan sebagai suatu *misi evangelis* untuk membantu jemaatnya. Mulford (2009) mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) yang dilaksanakan oleh Gereja harus dapat menjadi “mesin transformasi” (*engine of transformation*) dalam bentuk “saluran berkat” (*blessing flows*) bagi orang-orang yang percaya dan yang belum percaya bagi Yesus Kristus. Bahkan dalam operasinya, kegiatan bisnis yang dimiliki oleh Gereja di Amerika Serikat sudah menjadi suatu “*holding company*”, seperti yang dilakukan oleh First Assembly of God Church, LifeBridge Christian Church, Friendship Missionary Baptist Church, dan Evangelical Christian Credit Union (ECCU) California. Mereka mendanai dan mengoperasikan sekolah swasta, rumah penampungan, layanan makanan (catering), kartu kredit, pinjaman untuk pengusaha kecil, perumahan, pertokoan dan perkantoran, bisnis penerbangan komersil, dan arena olahraga.

Di Indonesia, banyak juga Gereja Katolik dan Protestan yang sudah mendirikan Koperasi-koperasi Umat, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, percetakan, dan lain sebagainya, yang semuanya didedikasikan untuk kesejahteraan jemaatnya. Tetapi apakah sudah dikelola secara *holding company* <sup>(3)</sup> ? Untuk pengembangan ke depan tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meningkatkan misi-misi ekonomi Gereja dalam rangka menyejahterakan jemaatnya akan diperlukan model *Incorporated* <sup>(4)</sup> yang berperan dan beroperasi sebagai mediator, fasilitator, dan mengkonsolidasikan potensi dan sumber daya ekonomi Gereja. Tetapi seperti apapun bentuk pengelolaannya, semua bentuk usaha ekonomi Gereja harus bermuara kepada upaya menyejahterakan jemaatnya.

### III. REVITALISASI PERAN GEREJA DALAM MEMAJUKAN (MEMBER-DAYAKAN) EKONOMI KERAKYATAN

Kesejahteraan bersama merupakan salah satu azas terpenting dalam cara berpikir dan cara bertindak Gereja. Gereja harus mengusahakan pelaksanaan asas itu secara sadar dan sengaja, karena Gereja yakin bahwa kesejahteraan bersama belum dapat sepenuhnya diserahkan kepada proses otomatis sebagai mana terjadi dalam mekanisme pasar. Dalam usaha itu, Gereja memandang bahwa kehidupan ekonomi yang tergantung pada kehendak para pengusaha berskala besar dan inisiatif pemerintah bukanlah arah yang bijaksana untuk mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>(3)</sup> *Holding Company* atau Perusahaan induk adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, bertujuan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai pasar perusahaan (*market value creation*)

<sup>(4)</sup> Sebuah *incorporated* adalah pelayungan manajemen untuk menguatkan jaringan baik vertikal maupun horisontal. Dalam konsep *incorporated*, pelaku usaha skala kecil dan menengah yang memiliki keunggulan komparatif, disatukan dalam sebuah holding, yang menjadi katalisator membangun *networking* produksi, distribusi, dan pemasaran di tingkat global.



Warga Gereja, khususnya kelompok yang miskin perlu dibangkitkan dan diberdayakan untuk mengusahakan kesejahteraan mereka sendiri melalui usaha-usaha ekonomi kecil dan mikro yang berbasis kerakyatan atau **ekonomi kerakyatan** <sup>(5)</sup>. Dukungan dari para pelaku usaha berskala besar dan dari pemerintah tentu diperlukan. Akan tetapi, dengan atau tanpa dukungan itu, kaum miskin dan lemah harus tetap bangkit memberdayakan diri. Untuk itu Gereja dapat melakukan dua arah gerakan sebagai penuntun langkah ke depan yaitu :

- (1) Usaha pemberdayaan potensi dan energi kaum miskin dan lemah dengan melibatkan kaum cendekiawan untuk mencari tata-kelola kehidupan ekonomi yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan bersama.
- (2) Desakan kritis kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi berskala besar untuk terlibat lebih aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan perhatian khusus kepada mereka yang miskin dan lemah, tanpa membuat kaum miskin dan lemah itu justru semakin tergantung.

Selain gerakan di atas, upaya aktif Gereja harus difokuskan pada pemberdayaan potensi dan energi sosio-ekonomi kaum miskin dan lemah itu sendiri., seperti keuangan mikro dan usaha koperasi yang sudah mulai dikembangkan di berbagai cabang pelayanan, perlu diperluas dan didukung sepenuhnya. Tentu saja usaha ini membutuhkan gerakan lain untuk mendesak agar berbagai kebijakan publik di bidang ekonomi semakin menempatkan kaum miskin dan lemah sebagai pelaku utama kehidupan ekonomi di negerinya sendiri. Oleh karena itu, Gereja harus benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat jemaat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.

Salah satu wujud tugas Gereja untuk memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan ini adalah merevitalisasi perannya yang lebih berfokus pada optimalisasi kelembagaan ekonomi kerakyatan, terutama dalam hal pembiayaan. Beberapa kajian empiris yang dilakukan oleh Asy'arie (2001) menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kerakyatan (misalnya, UKM dan Koperasi) adalah keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan, keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan akses pasar, keterbatasan organisasi dan pengelolaannya. Gereja diharapkan lebih berperan disini. Dengan terbangunnya kemampuan kelembagaan ekonomi kerakyatan ini, usaha-usaha ekonomi jemaat dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan yang hendaknya dapat dikreasikan melalui

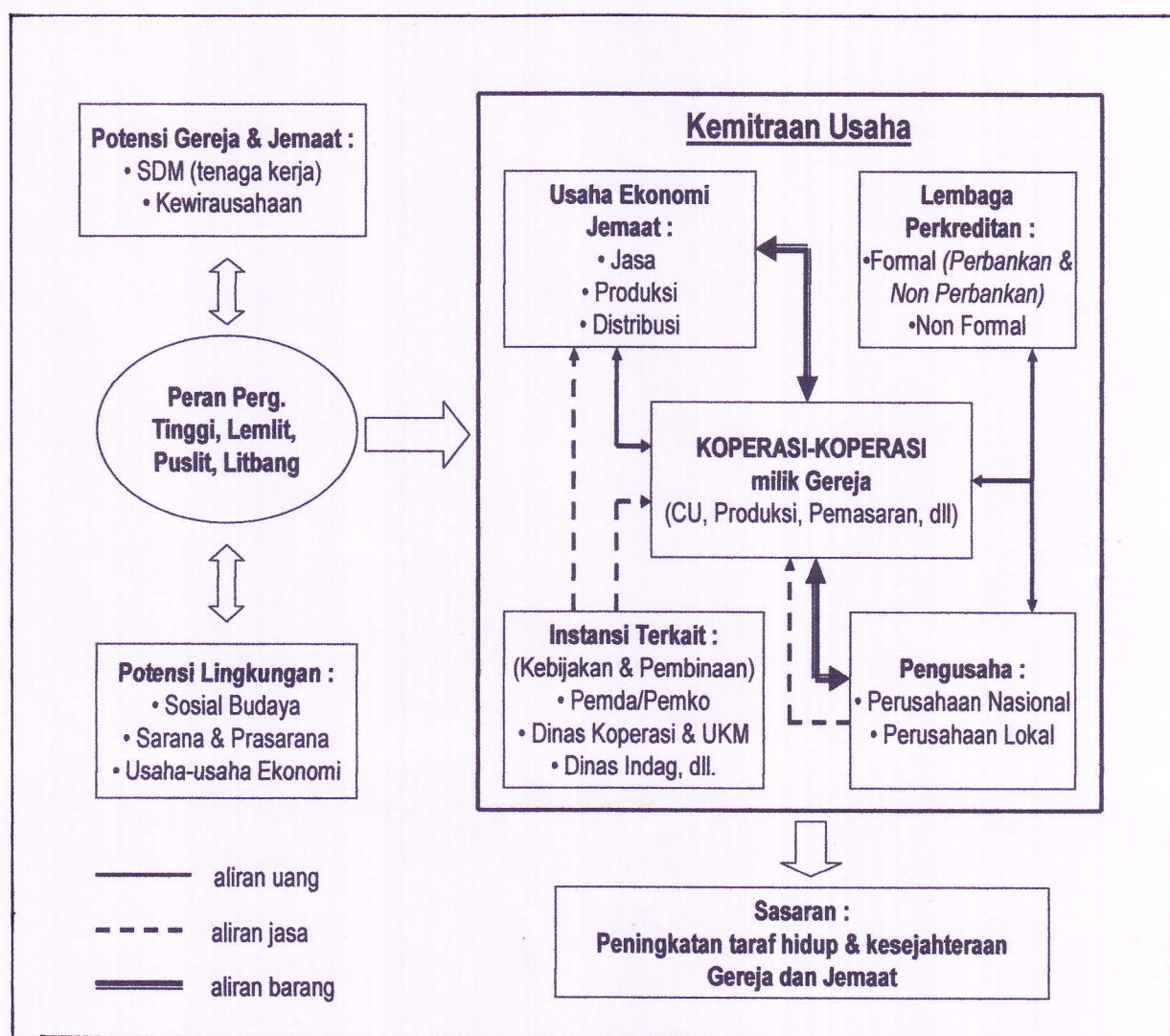
---

<sup>(5)</sup> Istilah "ekonomi kerakyatan" di Indonesia pertama sekali dipopulerkan oleh Muhammad Hatta dalam tulisan berjudul "Perekonomian Kolonial-Kapital" di Harian Daulat Rakyat tanggal 20 November 1931. Ekonomi kerakyatan yang dimaksudkan bukan hanya skala ekonomi, akan tetapi keinginannya jauh menuju kepada peran nilai-nilai lokal yang mempengaruhi kehidupan ekonomi. Saat ini "ekonomi kerakyatan" disodorkan oleh para penganjurnya sebagai paham ekonomi yang berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat miskin. Tujuannya, agar kelompok ini dapat menikmati pertumbuhan ekonomi secara lebih baik dan mereka juga dapat lebih jauh terlibat dalam aktivitas ekonomi. Inilah yang dikenal sebagai *pro-poor growth policy* (kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin).



sumberdaya pembiayaan sektor pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat, bahkan sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Menurut Syahza (2001), salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan peran kelembagaan ekonomi yang baik adalah membangun pola **kemitraan usaha**.

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan yang berbasis jemaat (Gereja), antara lain: 1) peran perguruan tinggi; 2) pengusaha ; 3) lembaga perkreditan; 4) usaha ekonomi jemaat pengusaha tani (petani); 5) instansi terkait; dan 6) koperasi milik Gereja. Rangkaian kerja dari faktor-faktor pendukung tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berbasis Jemaat

**Perguruan Tinggi (PT)** berperan melalui lembaga penelitian, atau pusat penelitian. Peran PT memiliki tiga dimensi kekuatan yaitu : (1) menggali potensi Gereja dan jemaat, (2) mengetahui potensi lingkungan masyarakat, serta (3) memberikan rumusan rekomendasi dari perpaduan dimensi pertama dan kedua kepada kelompok



mitra usaha. Sebagai lembaga indenpenden, PT juga berperan sebagai lembaga pemantau kegiatan usaha ekonomi jemaat.

Pada kelompok **mitra usaha** terlibat lima kelompok yang merupakan satu kesatuan yang saling berkait dalam kegiatan usaha ekonomi jemaat. Kelima kelompok mitra usaha ini harus merupakan satu kesatuan yang saling berkait dalam kegiatan ekonomi Gereja & jemaat. Untuk mengembangkan usaha ekonomi jemaat perlu dibentuk **koperasi** yang dioperasikan oleh Gereja. Koperasi berperan penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi jemaat. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar tentang peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. **Usaha ekonomi jemaat** melakukan usahanya berdasarkan perjanjian dengan pihak koperasi Gereja sebagai penyedia dana. Mereka melakukan kegiatan usahanya didampingi oleh tim ahli yang ditunjuk oleh koperasi.

Keterlibatan **instansi terkait** (pihak pemerintah) dalam model pemberdayaan ekonomi jemaat hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan tersebut menyangkut ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan. Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan usaha ekonomi jemaat. Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya. Pada model pemberdayaan ini, **lembaga perkreditan** hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi Gereja kepada usaha ekonomi jemaat. Koperasi mengajukan kredit modal kerja bagi usaha ekonomi jemaat dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri. Sementara kredit kepada **pengusaha** bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lainsebagainya). Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi Gereja dalam penyediaan sarana-sarana produksi. Pengusaha juga dapat memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya.

Usaha lain yang dapat dilakukan adalah memberdayakan organisasi melalui re-desain dan re-orientasi organisasi (Kasali, 2007). Re-desain organisasi yang paling cocok bagi Gereja ialah desain organik (hidup dan dinamis) bukan desain mekanistik (bergerak seperti mesin). Desain organik ini sesuai dengan gereja karena kehidupan Gereja yang dinamis dan bertumbuh searah dengan perubahan-perubahan sosial di sekitarnya. Selain itu desain organik ini dapat memberi kesempatan bagi kreativitas dan inovasi dalam gereja. Re-orientasi dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap-sikap positif dalam pembaharuan seperti keterbukaan terhadap hal-hal baru, penanaman nilai-nilai kedisiplinan, etos kerja dan kreativitas. Untuk mewujudkan hal ini, ada baiknya Gereja dan jemaatnya belajar dari pengalaman saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada warganya, Muhammadiyah membentuk Majelis-majelis dalam berbagai bidang (misalnya : majelis tarjih & tajdid, majelis tabligh dan dakwah, majelis wakaf dan zakat infaq sadhoqah, majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis kesehatan dan kesejahteraan rakyat, majelis ekonomi dan kewirausahaan, majelis pemberdayaan masyarakat, dan majelis pendidikan kader).



#### IV. PENUTUP

Pemberdayaan jemaat melalui pelayanan Gereja untuk memperbaiki kinerja, produktivitas, dan kualitas jemaat hanya dapat diwujudkan melalui perubahan. Dalam upaya itu, asas kesejahteraan warga perlu digunakan sebagai pendekatan. Artinya, asas kesejahteraan warga dipakai sebagai prinsip menyusun agenda dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan potensi ekonomi Gereja atau jemaat. Kita semua berkehendak untuk terlibat melakukan perubahan atas proses yang telah menyebabkan terjadinya gejala ketimpangan kesejahteraan ekonomi jemaat. Untuk itu pemberdayaan ekonomi kerakyatan (jemaat) perlu memperoleh prioritas dalam program Gereja, sehingga usaha ekonomi jemaat (pengusaha kecil, menengah dan koperasi) dapat berperan untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri. Berdasarkan perspektif tersebut, pemberdayaan ekonomi jemaat yang dilakukan harus mampu mengatasi dan mengurangi kendala dan hambatan yang dihadapi selama ini. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (jemaat) terletak pada motivasi dan orientasi pelakunya sendiri, yang amat beragam dimensi kelompok kepentingan ekonomi dan sosial.

Akhirnya, kita diharapkan untuk mengembangkan cara berpikir dan cara bertindak yang baru melalui kepekaan dan kepedulian terhadap sesama, sehingga kehidupan bersama dan kesesejahteraan bersama dapat tercapai.

#### DAFTAR REFERENSI

- Almanak HKBP Tahun 2011, *Khotbah Awal Tahun Ephorus HKBP Pdt. Dr. Bonar Napitupulu pada 1 Januari 2011*.
- Anonim, 2010, *Keadilan Bagi Semua : Pendekatan Sosio-Ekonomi*, <http://gemarosari.blogspot.com/2010/08/html>.
- Asy'arie, Musa. 2001, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta.
- Dayton, Howard, 2005, *Pelajaran Keuangan Menurut Alkitab*, Penerbit : Crown Financial Ministries Indonesia, Jakarta, <http://www.crown.or.id/produk.htm>.
- Hidayat, Paul, 2006, *Perspektif Kristen tentang Ekonomi*, Edisi 075/VI/2006/ <http://www.sabda.org/e-reformed/>
- Human Development Index (HDI), United Nations, 2010, <http://www.un.co.id>.
- Kasali, Rhenald, 2007, *Re-code Your change DNA: Membebaskan Belenggu-Belenggu Untuk Meraib Keberanian Dan Keberhasilan Dalam Pembaharuan*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Lumbantobing, Darwin, 2007, *Teologi di Pasar Bebas*, Penerbit L-SAPA (Lembaga Studi Agama, Pembangunan dan Budaya), Pematang Siantar.



- Mangeloja, Esa, 2003, *Application of Economic Concepts on Religious Behavior*, School of Business and Economics, University of Jyväskylä, Finland, P.O.Box 35, FIN-40014,  
<http://129.3.20.41/eps/otr/papers/0310/0310003.pdf>
- Mulford, John E., 2009, *The Church and Business : Working together in God's plan of Redemption*, VOICE for All Nations, <http://kingdomentrepreneur.blogspot.com/2009/05/>
- Nath, Sushmit, 2007, *Religion & Economic Growth and Development*, Indira Gandhi Institute of Development Research, MPRA Paper No. 8181, <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8181/>
- RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2010 – 2014, Bappenas, Jakarta.
- Skousen, Mark, 2001, *The Making of Modern Economics, The lives and Ideas of the Great Thinkers* (Terjemahan Indonesia : “Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern”, Alih Bahasa T. W. B. Santoso, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2005).
- Syahza, Almasdi, 2001, *Studi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Propinsi Riau*, PPKPEM Universitas Riau, Pekanbaru.
- Veen, Made Gunarakswati Mastra, 2009, *Teologi Kewirausahaan, Konsep dan Praktik Bisnis Gereja Kristen Protestan di Bali*, Penerbit : Taman Pustaka Kristen dan Centre for Business Ethics and Profesionalism ,Universitas Kristen Duta Wacana, Salatiga.
- West, Edwin G., 1990, *Adam Smith and Modern Economics, From Market Behaviour to Public Choice*, Edward Elgar Publishing Ltd., Vermont, USA..
- Wilhelmus, Ola Rongan, 2010a, *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Sebagai Suatu Model Evangelisasi Dalam Konteks Indonesia*, STKIP Widya Yuwana Madiun (Seminar Paper).
- Wilhelmus, Ola Rongan, 2010b, *Gereja dan Politik*, STKIP Widya Yuwana Madiun (Seminar Paper).